

Gus Yahya Sebut PBNU Siap Kelola Tambang dari Negara

JAKARTA (IM) - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menyatakan, PBNU siap mengelola konsesi tambang yang diberikan pemerintah.

Gus Yahya, sapaan akrabnya, PBNU mempunyai sumber daya manusia, perangkat organisasi, dan jaringan bisnis yang mampu mengelola konsesi tambang.

"Nahdlatul Ulama telah siap dengan sumber daya-sumber daya manusia yang mumpuni, perangkat organisasional yang lengkap dan jaringan bisnis yang cukup kuat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut," ujar Gus Yahya dalam siaran pers, Senin (3/6).

PBNU memiliki jaringan organisasi yang terstruktur dari pusat hingga desa serta berbagai lembaga yang melayani kebutuhan masyarakat di berbagai bidang

hingga tingkat akar rumput.

Jaringan tersebut bakal menjadi saluran efektif untuk mendistribusikan manfaat dari konsesi tambang yang diberikan pemerintah.

Selain itu, PBNU juga akan menyiapkan struktur bisnis dan manajemen yang akan mengelola konsesi tambang.

"Nahdlatul Ulama akan menyiapkan suatu struktur bisnis dan manajemen yang akan menjamin profesionalitas dan akuntabilitas, baik dalam pengelolaan maupun pemanfaatan hasilnya," kata Gus Yahya.

Gus Yahya berjanji, PBNU akan bertanggung jawab atas konsesi tambang yang diberikan pemerintah dan akan memanfaatkannya dengan sungguh-sungguh.

Ia berharap dengan rasa tanggung jawab itu tujuan dari kebijakan afirmasi di sektor tambang akan tercapai. ●mei

KPK Rekrut Penyidik dan Penyelidik, Tak Perlu Rekomendasi Lembaga Lain

JAKARTA (IM) - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menegaskan, lembaganya tidak perlu meminta restu dari lembaga lain, seperti Polri, saat merekrut penyidik dan penyelidik.

Alex menyinggung Pasal 16 Ayat (1) dalam draf revisi Undang-Undang (RUU) Polri yang mengatur proses rekrutmen Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Kementerian/Lembaga harus mengantongi rekomendasi Polri.

"KPK tidak perlu meminta restu dari lembaga lain untuk mengangkat penyelidik maupun penyidik," kata Alex saat dihubungi wartawan, Senin (3/6).

Menurut Alex, KPK berwenang merekrut personel penyidik maupun penyelidik sendiri. Ia menyebutkan, koordinasi dengan lembaga lain seperti Polri dan Kejaksaan Agung, dilakukan ketika melatih penyelidik dan penyidik yang baru direkrut. Kewenangan KPK merekrut penyidik dan penyelidik sendiri berkaitan dengan independensi lembaga yang dijamin undang-undang (UU).

"Satu hal yang tidak bisa diganggu adalah persoalan independensi KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU KPK," ujar Alex.

Mantan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) ini mengkritik Pasal 14 Ayat 1b draft RUU Polri yang menyebut Polri berwenang mengawasi dan membina PPNS. Dalam kasus korupsi justru undang-undang justru memberikan

mandat kepada KPK untuk mengawasi aparat penegak hukum (APH) lain.

"Jadi jangan dibolak-balik," kata Alex menegaskan.

Sebelumnya, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyoroti muatan RUU Polri yang dinilai menjadikan kepolisian menjadi lembaga super body dan berpotensi mengintervensi lembaga lain seperti KPK.

Salah satu materi yang disorot adalah Pasal 14 Ayat 1b yang menyebut lembaga itu bisa mengawasi dan membina teknis PPNS di lembaga lain. Kemudian, mereka juga mempersoalkan Pasal 16 Ayat (1) yang menyebut kementerian/lembaga yang merekrut PPNS harus mendapatkan rekomendasi polisi.

Ketua YLBHI Muhammad Isnur menyebutkan, pasal tersebut membuka wewenang bagi kepolisian untuk mengintervensi kasus di lembaga lain seperti KPK. Padahal, KPK memiliki riwayat "Cicak Vs Buaya" ketika menangani kasus korupsi di kepolisian.

"Jadi ketika KPK mau merekrut penyidik, jaks agung mau merekrut penyidik, KLHK mau merekrut penyidik lingkungan hidup, harus ada rekomendasi kepolisian," kata Isnur di Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (2/6) kemarin.

"Nah kalau kita berkaca ini, akan menjadi catatan yang sangat tidak baik, berarti ada upaya intervensi. Kita punya catatan terhadap sikap 'cicak-buaya' 1, 2, 3," ujarnya. ●han

Tersangka Penyup Lukas Enembe Meninggal Dunia karena Sakit

JAKARTA (IM) - Piton Enumbi merupakan salah satu tersangka penyup mending Gubernur Papua, Lukas Enembe, meninggal dunia pada Kamis (30/5).

"Berdasarkan surat sertifikat medis yang diterbitkan Rumah Sakit Provita Jayapura dinyatakan meninggal dunia karena alasan medis," kata Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (3/6).

Ali mengatakan, KPK akan membahas status hukum Piton setelah ia meninggal dunia.

Piton merupakan direktur dan pemilik PT Melonesia Mulia yang disebutkan menyup Lukas Rp 10.413.929.500 (Rp 10 miliar lebih). Nama Piton sebelumnya muncul dalam persidangan perkara suap Lukas senilai Rp 45,8 miliar dan gratifikasi Rp 1 miliar.

Uang itu diterima Lukas bersama-sama anak buahnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua, Kael

Kambuaya, dan eks Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua, Gerius One Yoman.

Se b a n y a k R p 10.413.929.500 di antaranya berasal dari suap Piton Enumbi sementara Rp 35.429.555.850 dari Direktur PT Tabi Anugerah Pharmindo, PT Tabi Bangun Papua dan pemilik Manfaat CV Walibhu bernama Rijatono Lakka.

Pada Pengadilan tingkat pertama, Lukas divonis 8 tahun penjara, denda Rp 500 juta subsider 4 bulan kurungan dan uang pengganti Rp 19.690.793.900. Hukuman itu diperberat oleh hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjadi 10 tahun penjara, denda Rp 1 miliar subsider 4 bulan kurungan dan uang pengganti Rp 47,8 miliar.

Beberapa waktu setelah itu, Lukas meninggal dunia setelah dibantarkan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto Jakarta. ●han

2 | Polhukam

FOTO: ANTARA



RAKER PANSUS DPR DENGAN MENKO POLHUKAM

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto (tengah) bergabung dengan anggota DPR usai mengikuti rapat kerja dengan Pansus DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/6). Raker tersebut membahas RUU tentang perubahan atas undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan.

PAN Tak Masalah Tim Sinkronisasi Bentuk Prabowo Subianto Hanya Diisi Orang Gerindra

Tim sinkronisasi itu perlu dibentuk untuk menyiapkan peralihan kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Prabowo Subianto.

JAKARTA (IM) - Partai Amanat Nasional (PAN) tak mempersoalkan komposisi Tim Gugus Tugas Sinkronisasi bentuk presiden terpilih, Prabowo Subianto, berisi para petinggi Partai Gerindra.

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menilai, tim sinkronisasi yang bersifat internal Gerindra itu tidak mengganggu jalannya komunikasi di antara partai politik pendukung Prabowo karena

para pimpinan partai politik pun sering bertemu di rapat-rapat kabinet.

"Bagi kami, PAN, itu ya tidak ada masalah, karena memang sesuatu yang rutin, di PAN, Golkar itu kan setiap hari ketemu di rapat-rapat kabinet," kata Viva Yoga kepada wartawan, Senin (3/6).

PAN berpandangan bahwa tim sinkronisasi itu perlu dibentuk untuk menyiapkan peralihan kepe-

mimpinan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Prabowo Subianto. Ia mengingatkan, pembangunan nasional juga harus lebih cepat dilakukan.

"Jadi ya proses untuk persiapan-persiapan untuk melanjutkan pembangunan nasional itu ya tidak terkendala oleh waktu dan komunikasi. Jadi setiap hari juga komunikasi untuk melanjutkan pembangunan," ujarnya.

Viva Yoga juga mengakui bahwa partai politik anggota Koalisi Indonesia Maju tidak dilibatkan dalam pembentukan tim tersebut, tetapi ia menilai itu bukan sebuah masalah.

"Jadi, ya buat Partai Amanat Nasional, hal itu

baik-baik saja. Dan sesuatu yang normal, karena proses sinkronisasi sangat penting dilakukan dalam masa persiapan peralihan kepemimpinan nasional," kata Viva Yoga.

Diberitakan sebelumnya, Prabowo Subianto membentuk Tim Gugus Tugas Sinkronisasi yang berisi sejumlah elite Partai Gerindra. Tim ini untuk menyiapkan proses pemerintahan berikutnya.

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan, penunjukkan anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi tersebut merupakan hak Prabowo Subianto sesuai dengan kebutuhannya.

"Ya (penunjukkan) adalah hak presiden terpilih, karena yang tujuan membentuk tim itu untuk mencari data dan sinkronisasi, yang akan digunakan sebagai bahan mengambil keputusan strategis, yang menjadi hak prerogatif presiden terpilih. Tentu adalah hak dari presiden terpilih untuk menunjuk timnya," kata Dasco saat dihubungi wartawan pada Minggu (2/6).

Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi itu menuturkan, hasil kerja-kerja tim gugus

tugas akan digunakan sebagai bahan dalam merumuskan kebijakan strategis yang menjadi hak prerogatif presiden terpilih. Pembentukan Tim Gugus Tugas juga penting untuk mempersingkat waktu penyesuaian ketika pemerintahan baru mulai berjalan.

"Nah, sehingga presiden terpilih boleh saja kemudian membentuk tim tersendiri untuk mencari data sebagai bahan masukan dan kajian terkait hak khusus yang dijamin oleh UU," katanya.

Elite Partai Gerindra yang duduk di gugus tugas, di antaranya Ketua Harian Sufmi Dasco Ahmad selaku ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi, Sekretaris Jenderal Ahmad Muzani sebagai wakil ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi.

Prabowo juga merancang tim di bidang klaster ekonomi yang dipimpin Bendahara Umum Gerindra Thomas Djwandono yang juga keponakannya. Ada tiga orang anggota bidang klaster ekonomi yang semuanya adalah elite Gerindra, yakni Wakil Ketua Umum Budisatrio Djwandono, Wakil Ketua Umum Sugiono, dan Ketua OKK Prasetyo Hadi. ●han

Febri Diansyah Akhirnya Ngaku Dibayar Rp800 Juta untuk Jadi Pengacara SYL dkk

JAKARTA (IM) - Mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kini menjadi advokat, Febri Diansyah, akhirnya mengakui menerima honor Rp800 juta saat menjadi pengacara eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) dan kawan-kawan (dkk).

Pengakuan tersebut disampaikan Febri ketika bersaksi di persidangan kasus pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) dengan terdakwa SYL dan dua orang anak buahnya.

Diketahui, Febri sempat menjadi pengacara SYL ketika kasusnya masih dalam proses penyelidikan. Honor ratusan juta itu terungkap saat Hakim Anggota, Fahzal Hendri menanyakan Febri soal honor yang ia terima saat menjadi pengacara SYL.

"Berapa menerima honor?" tanya Hakim Fahzal di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (3/6).

"Honorarium itu kami bagi Yang Mulia, izin menjelaskan. Satu, di tahap penyelidikan kami menerima honorarium ini mengacu Pasal 21 UU advokat berdasarkan kesepakatan pada

saat itu," jawab Saksi.

Tidak puas dengan jawaban tersebut, Hakim Fahzal kembali melemparkan pertanyaan perihal honor.

"Berapa nilainya?" tanya Hakim Fahzal kembali.

"Apakah tepat saya sampaikan di sini Yang Mulia?" jawab Febri saat diminta menyebutkan nominal honorariumnya.

Hakim Fahzal pun kemudian menjelaskan mengapa Febri harus menjawab pertanyaan tersebut. Menurutnya, hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 165 Ayat (1) KUHP.

"Karena kalau penuntut umum yang tanya ndak perlu Pak Febri jawab, penasihat hukum yang tanya ndak perlu dijawab. Tapi kalau Hakim yang tanya harus dijawab, apa dasarnya? Dasarnya Pasal 165 Ayat (1) KUHP. Hakim apa saja boleh ditanyakan kepada saksi," ujar Hakim Fahzal.

"Kenapa saya tanya begitu? Apakah niat ini datangnya dari saudara atau karena sesuatu keadaan, itu pertimbangan dari hakim Pak Febri, silakan jawab, berapa aja ya ndak ada soal Pak, kan itu hak saudara, tidak melanggar, oke profesional. Silakan

jawab," lanjutnya.

"Pada saat itu di tahap penyelidikan yang disepakati totalnya adalah Rp800 juta," jawab Saksi.

"Untuk 8 orang?" cecar Hakim Fahzal.

"Tim kami ada 8, untuk tiga klien Yang Mulia," jawab Saksi.

Perlu diketahui, SYL ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan). Dalam perkara tersebut, KPK juga menetapkan Sekjen Kementan, Kasdi Subagyo dan Direktur Alat dan Mesin Kementan, Muhammad Hatta sebagai tersangka.

Ketiganya pun saat ini menjadi terdakwa dalam kasus tersebut yang rangkaian sidangnya digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta. Kepada SYL, KPK juga menetapkan tersangka terkait dugaan TPPU.

"Tersangka SYL turut pula disangkakan melanggar Pasal 3 dan atau 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang," kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Gedung KPK, Jakarta, Jumat 13 Mei 2024. ●han



PKB TERIMA PENDAFTARAN 3.014 BAKAL CALON KEPALA DAERAH Ketua Desk Pilkada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Halim Iskandar memberikan keterangan pers terkait hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) Bakal Calon Kepala Daerah Lanjutan di DPP PKB, Jakarta, Senin (3/6). PKB menerima sebanyak 3.014 pendaftaran bakal calon kepala daerah di seluruh Indonesia, dari jumlah tersebut 2.990 di antaranya dianggap memenuhi kelengkapan secara administratif.

OPM Kembali Tembak Mati Warga Sipil

JAYAPURA (IM) - Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali menembak mati seorang warga sipil di Mulia Kabupaten Puncak Jaya pada Kamis (30/5) lalu. Dalih korban adalah aparat selalu dijadikan alasan.

Korban atas nama Zainul (44) yang kesehariannya adalah seorang ojek di kampung Usir Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya.

Zainul meninggal di tempat setelah OPM menembak korban pada bagian kepala saat mengendarai motor pada malam hari sekitar pukul 19.00 WIT, di kampung Usir Belakang.

Kasus pembunuhan dengan sarannya warga sipil nyata masif terus dilakukan kelompok OPM dengan dalih korbannya adalah aparat. Klime ini lantas dinarasikan dan disebar ke berbagai media sosial milik OPM.

Serangkaian aksi pembunuhan warga sipil oleh OPM ini termasuk pembakaran fasilitas umum baik sekolah maupun fasilitas lain tentu berakibat stabilitas keamanan yang berujung pada merosotnya pembangunan di wilayah itu.

"OPM selalu menginginkan pertumpahan darah dan ingin masyarakat menderita. Mereka penjahat-penjahat kemanusiaan," ujar Kapendam XVII/Cenderawasih Letkol Inf Candra Kurniawan, Senin (3/6).

"Sesungguhnya OPM adalah gerombongan penjahat yang mengingankan Papua terpuruk," tegasnya.

Kapendam menegaskan, TNI tetap akan bertindak tegas untuk menjaga dan melayani masyarakat. Pembangunan infrastruktur termasuk Pendidikan dan Kesehatan harus terus berjalan untuk masyarakat Papua.

"Masyarakat harus dilindungi. Untuk itu, TNI tetap bertindak tegas dan hadir untuk masyarakat agar masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan dan tenaga kesehatan, guru serta semua pihak dapat bekerja untuk masyarakat," ungkap Candra.

Candra membantah korban penembakan anggota OPM adalah aparat. Menurutnya, OPM selalu menyebar hoaks telah membunuh aparat TNI untuk tujuan untuk mencari pembenaran atas tindakan mereka.

"Tidak benar Prajurit TNI ditembak mati oleh OPM di Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, itu semua Hoax yang sengaja disebar oleh gerombolan OPM dan simpatisannya," tegas Kapendam.

"Yang benar, korban penembakan OPM itu adalah warga sipil a.n Zainul (44) yang ditembak di bagian kepala saat mengendarai motor pada malam hari, Kamis 30 Mei 2024 di kampung Usir Belakang, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia," imbuh Candra.

Lebih lanjut Kapendam mengungkapkan bahwa aparat keamanan TNI Polri sedang melakukan pengejaran terhadap para pelaku gerombolan OPM tersebut.

"Hoax sengaja disebar oleh OPM dan simpatisannya untuk menciptakan keresahan dan ketakutan serta mengganggu kondusifitas kehidupan bermasyarakat," ungkap Candra.

Candra berharap masyarakat tetap tenang karena sampai saat ini aparat keamanan TNI Polri tetap hadir dan bertugas melindungi maupun melayani masyarakat. ●mei